

KONFLIK AGRARIA DI URUTSEWU

Maulida Illiyani

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
maulidailliyani@gmail.com



Judul : Seni dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urutsewu
(Etnografi wilayah konflik agrarian di Kebumen)

Penulis : Tim ESBUSMUS

Editor : Anna Mariana dan Bosman Batubara

Penerbit : Literasi

Tebal : xiv + 340 halaman

Cetakan : 1, Juli 2015

Pengantar

Konflik penguasaan tanah, atau yang biasa disebut konflik tenurial, hingga saat ini masih saja berlangsung di Indonesia. Tidak hanya antara pihak swasta dengan masyarakat, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Hakikat berdirinya pemerintahan di suatu negara adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengurus berjalannya negara dengan baik, demi mencapai kesejahteraan. Maka, membaca buku tentang konflik agraria di Urutsewu ini menjadi semacam refleksi untuk mempertanyakan, apakah pemerintah sudah melakukan fungsinya dengan benar atau tidak?

Buku ini menceritakan bagaimana konflik tenurial di sebuah wilayah diperingati melalui seni dan sastra dalam serangkaian kegiatan yang berakhir dengan arak-arakan budaya pada tanggal 16 April 2014. Arak-arakan budaya, yang kemudian dalam buku ini disebut AAB, adalah kegiatan yang dipelopori oleh sekumpulan aktivis; Angga, Bosman, Reza (anggota Gerakan literasi Indonesia (GLI)), bersama dengan Cak Sunu, seorang Kepala Desa Wiromartan (masuk dalam wilayah Urutsewu) yang sedang berkonflik penguasaan atas tanah dengan TNI AD.

Kegiatan itu kemudian dinamakan Solidaritas Budaya untuk masyarakat Urutsewu, yang disingkat menjadi ESBUSMUS. Pada

akhirnya ESBUSMUS terbentuk dari dua belas aliansi yang berkompeten dalam bidang seni, peneliti, dan akademisi, yaitu; (1) Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), (2) Urutsewu Bersatu (USB), (3) Gerakan Literasi Indonesia (GLI), (4) Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), (5) Sanggar rupa seni rangka tulang, (6) Sanggar Nusantara, (7) Mantra Merah Putih, (8) Teater 42, (9) Yayasan Desantara, (10) Etnohistori, (11) Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng, dan (12) Teater Gerak IAINU Kebumen. Dua belas komunitas tersebut berasal dari berbagai fokus kegiatan dan latar belakang, mulai dari serikat petani, komunitas sastra, hingga komunitas seni dan budaya.

Buku ini diawali sebuah prolog, kemudian dilanjutkan dengan tiga subtema yang tersusun sistematis, dan pada akhirnya ditutup dengan epilog. Prolog yang ditulis oleh Bosman Batubara, menceritakan bagaimana kesenian dapat digunakan sebagai gerakan perjuangan mengembalikan hak tenurial warga urutsewu dari klaim sepihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Setelah itu, pada subtema pertama, pembaca akan disuguhi pemaparan mengenai penyebab awal dari konflik agraria di Urutsewu. Subtema kedua menceritakan secara etnografi persiapan dan pelaksanaan AAB. Subtema bagian kedua ini merupakan jawaban dari subjudul pada buku yaitu "Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen". Kemudian subtema yang ketiga

memaparkan pergolakan dan intimidasi yang terjadi saat AAB berlangsung. Epilog menutup kisah dari buku ini, yang ditulis oleh Anna Mariana. Di dalam epilog dijelaskan bahwa kolaborasi antara gerakan seni dan agraria bukanlah hal yang baru. Namun, sebagai sebuah gerakan yang berasal dari rakyat, kolaborasi tersebut merupakan terobosan baru yang baik. Sebab perjuangan semacam ini membutuhkan nafas panjang yang berasal dari rakyat itu sendiri.

Cerita di Balik Konflik Agraria Urutsewu

Objek konflik adalah tanah wilayah pesisir dari 15 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang biasa disebut Urutsewu. Urutsewu terletak di antara muara sungai Luk Ulo sampai Sungai Wawar, sepanjang 22,5 km dari timur ke barat dengan lebar 500 hingga 1000 meter dari pinggir pantai. Ada berbagai versi mengenai hak menguasai tanah di Urutsewu antara TNI AD dan masyarakat. Menurut TNI AD, Urutsewu pada tahun 1937 hingga 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil diusir keluar dari Indonesia, pada tahun 1940 hingga 1949 dikuasai dan digunakan oleh Jepang dan pada akhirnya ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini dikuasai dan digunakan oleh TNI AD sebagai daerah pertahanan dan latihan. Namun, menurut masyarakat, salah satunya Karto Mihardjo, seorang saksi sejarah, saat dia berumur 17 tahun di tahun 1932, tanah dari gumuk (bukit pasir) ke darat adalah milik rakyat, gumuk ke laut sejauh 250 m adalah tanah kompeni.

Permasalahan di Urutsewu juga terkait keberatan warga dengan latihan TNI AD. Latihan TNI AD pada Maret 1998 menimbulkan korban jiwa. Lima anak menemukan mortir sisa latihan dan membawanya pulang. Di rumah, mortir tersebut digunakan untuk bermain-main dan meledak. Kelima anak tersebut meninggal dunia. Hal tersebut merupakan pukulan berat bagi warga Urutsewu. Selain itu, latihan TNI AD juga mengakibatkan rusaknya tanaman petani. Pada bulan November 2008, TNI AD melakukan serangkaian latihan dan perlombaan yang mengakibatkan tanaman jagung milik petani bernama Mukhlas dan Marsino rusak. Pihak Dislitbang TNI AD tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Kemudian klaim TNI AD atas tanah Urutsewu sebagai lokasi latihan

mengakibatkan hilangnya mata pencaharian warga, yaitu bertani.

Rangkaian konflik pernah dimusyawarahkan antara Kodam IV Diponegoro dengan masyarakat dan Pemda Kebumen pada tahun 2007, yang menghasilkan keputusan bahwa TNI AD tidak akan mengklaim tanah rakyat, kecuali yang 500m dari bibir pantai. Sayangnya kesepakatan ini dilanggar TNI AD, ketika pada tahun 2008 mereka malah memberikan izin pada PT. MNC untuk melakukan penambangan pasir besi. Hal ini membuat konflik berkembang. Konflik tersebut berkembang karena masyarakat tidak sekedar menghargai lingkungan tetapi juga menggunakan daerah tersebut sebagai tempat tinggal dan sebagai pusat perekonomian mereka, yaitu pertanian perkebunan. Warga Urutsewu menuntut agar wilayah Urutsewu ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata saja.

Konflik makin memanas di tanggal 16 April 2011 saat warga melakukan ziarah ke makam lima anak korban mortir, yang diikuti dengan blokade jalan menuju makam oleh warga. Blokade ini dibongkar oleh TNI AD. Pembongkaran tersebut dibalas oleh warga dengan memblokade lagi dengan kayu, sekaligus merobohkan gapura TNI AD, dan melempari gudang amunisi bekas yang dibangun di atas tanah milik warga. Kemudian Tentara mengejar, menangkap, menembak, dan memukul warga. Kejadian ini menyebabkan enam petani dikriminalkan dengan pasal perusakan dan penganiayaan, 13 orang luka-luka, 12 sepeda motor milik warga rusak, dan barang lainnya, seperti ponsel kamera dirampas TNI AD. Tiga tahun setelah bentrokan pada tanggal 16 April 2011 tersebut, TNI AD masih terus berusaha menguasai tanah dengan cara membuat sertifikat tanah di Urutsewu dan melakukan pemagaran selebar 750-1000 m dari bibir pantai sepanjang 22,5 km. Maka, Arak-arakan Budaya ini merupakan pagelaran yang diadakan ESBUSMUS bersama masyarakat Urutsewu untuk mengenang peristiwa tersebut.

Melihat pemaparan di atas, kemudian muncul pertanyaan. Apakah tanah di wilayah pesisir Urutsewu tersebut merupakan tanah negara yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh TNI AD atau tanah warga Urutsewu? Maka penting untuk memahami apa itu tanah negara. Penggunaan istilah tanah negara bermula pada zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep Pemerintah Hindia Belanda yang, secara singkat,

menyatakan bahwa semua tanah pihak lain yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak miliknya adalah milik negara (Sumardjono, 2005). Namun, setelah adanya UUPA, konsep tanah negara berubah dari memiliki menjadi menguasai. Menguasai di sini maksudnya adalah negara berwenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah. Definisi tanah negara oleh UUPA, dan yang diamini secara positivistik oleh Indonesia, hingga saat ini adalah tanah yang tidak dilekati hak (milik, guna usaha, guna bangunan, pakai atas tanah negara, pengelolaan, ulayat, dan wakaf) (Harsono, 2008). Sementara itu, TNI dalam hal ini AD adalah wakil dari negara, khususnya bagian keamanan.

Dalam kasus Urutsewu, tanah di sana adalah tanah yasan, tanah pemajekan, tanah milik bersertifikat, juga tanah komunal (tanah pembuatan garam, tanah bera sengaja) berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dipaparkan dalam buku ini. Maka, dapat dikatakan bahwa Urutsewu bukan tanah negara dan pihak yang berhak menggunakannya adalah warga yang memegang alas hak tanah tersebut. Alas hak tanah bisa saja sertifikat atas tanah, atau bukti pembayaran pajak di zaman Belanda, seperti girik dan letter C.

Konflik tanah di Urutsewu berkepanjangan dan berdampak luas. ESBUSMUS dengan gerakan budayanya, berfungsi sangat baik sebagai pemantik kembali semangat warga Urutsewu yang sempat redup. Namun, hingga saat ini konflik Urutsewu tersebut belum juga berakhir. Mediasi yang dilakukan antara warga dan TNI AD tidak pernah sampai pada pemufakatan *win-win solution*. Mungkin, konflik ini perlu diselesaikan oleh hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Catatan Etnografi Persiapan AAB

Subbab selanjutnya adalah catatan etnografi tentang peringatan 16 April yang dilaksanakan dengan melakukan AAB bersamaan dengan pengajian yang biasa dilakukan warga Urutsewu setiap tahunnya dalam rangka memperingati tragedi penembakan 16 April 2011. Alasan mengapa metode menulis etnografi yang digunakan dalam memaparkan peringatan 16 April tidak dibahas di dalam buku ini. Namun, etnografi memang metode yang tepat karena bisa membawa pembaca memasuki dinamika secara detail proses persiapan dan

pelaksanaan AAB. Menurut Sutisna (2012), etnografi adalah salah satu metode dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian etnografi ini dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Dengan teknik *observatory participant*, etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam suatu masyarakat. Hal ini sangat cocok dengan ESBUSMUS yang memilih untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat dalam proses dan pelaksanaan AAB.

Metode etnografi dalam menangkap proses dan persiapan AAB disampaikan dengan sangat baik oleh Amanatia Junda, anggota GLI yang tergabung dalam ESBUSMUS. Amanatia membagi tulisan dalam tiga periodisasi, yaitu; **Sebelum Turba, Turba, dan Sesudah Turba**. Turba yang dimaksud Amanatia dalam tulisan ini adalah Turba yang dijelaskan oleh Kusni dalam bukunya *Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten*. Kusni (2005: xvii) menceritakan bahwa istilah turba muncul pertama kali sebagai tanggapan Njoto atas gagasan Joebaar Ajob, sekretaris umum Lekra, mengenai asas “meluas dan meninggi”. Njoto menanggapi gagasan itu dengan mengatakan bahwa prinsip “meluas” tidak cukup hanya dilakukan dengan menciptakan ekspresi-ekspresi kultural baru, tetapi juga menuntut agar seniman dan pekerja kebudayaan bergerak ke bawah: bekerja dan mencipta bersama rakyat. Gagasan Njoto ini kemudian dikenal sebagai “**Turun ke Bawah**” atau “Turba”. Turba adalah metode untuk mendapatkan “pemahaman yang tepat atas kenyataan-kenyataan di dalam perkembangannya yang maju”, bukan buah rekayasa tetapi hasil dari penelitian dan pengenalan konkret seniman (hlm 218). Turba menjadi cara ESBUSMUS untuk lebur dengan akar rumput karena hingga saat ini “seni untuk rakyat” masih relevan meskipun telah setengah abad Lekra dipadamkan dari Indonesia, dan ESBUSMUS membuktikannya.

Ada dua konsep turba yang Amanatia ceritakan dalam buku ini. Kedua konsep tersebut juga ia dapatkan dari Kusni. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua konsep tersebut. 1) Turba bagaikan seorang penunggang kuda, yang melihat pemandangan seperti pelancong kemudian pulang ke kota dan mengisahkan tamasyanya tersebut. Turba semacam ini tidak menghasilkan pemahaman yang dalam bagi pekerja kesenian. 2) Turba empat sama, yaitu sama tinggal, sama makan, sama kerja, dan sama

diskusi. Turba jenis kedua inilah yang sebenarnya dapat memberikan pemahaman yang dalam bagi pekerja seni. Menurut Amanatia dan Bosman, ESBUSMUS di Urutsewu masih berada di turba nomor satu. Hal ini tampak dari undangan dan penghormatan warga terhadap mereka. ESBUSMUS masih dianggap sebagai tamu atau pelancong yang dilayani. Hal ini adalah autokritik bagi ESBUSMUS, tetapi Amanatia mengakui bahwa turba di Urutsewu adalah permulaan yang sangat berkesan bagi siapapun yang terlibat walaupun baru sampai pada jenis turba nomor satu.

Sebelum Turba diawali dengan kegiatan pengumpulan dana. ESBUMUS meyakini bahwa gerakan kebudayaan yang akan diwujudkan April nanti adalah gerakan berbasis massa, maka modal AAB pun berasal dari aksi solidaritas massa. Penggalangan dana dengan pentas kesenian dipusatkan di Yogyakarta, selama empat malam dan tiga hari. Penggalangan dana ini berhasil mengumpulkan uang tidak lebih dari Rp 5.000.000. Namun, hal yang perlu digarisbawahi dalam proses ini adalah, sebagaimana banyak gerakan komunitas lainnya, bukan nominal uang yang menjadi tujuan, tetapi kebersamaan dalam menyebarkan solidaritas budaya yang menjadi bahan bakar utama gerakan para aktivis.

Turba adalah kegiatan yang dilakukan ketika ESBUSMUS datang ke Urutsewu dalam kunjungan ketiga sekaligus persiapan menuju hari pelaksanaan AAB. ESBUSMUS hadir dari berbagai disiplin kesenian, di antaranya teater yang diwakili teater 42, tari dan musik yang diwakili oleh Sanggar Nusantara dan Mantra Merah Putih, serta seni rupa yang diwakili oleh Rupa Seni Rangka Tulang. Adapun GLI sejak semula telah berperan dalam perumusan ide, konsolidasi, hingga metode pewartaan dan meluaskan jaringan kerja.

Maka turba kali ini dilakukan dengan cara masing-masing aliansi menyebar ke masyarakat untuk melakukan persiapan AAB berdasarkan keahlian. Tim tari bekerja bersama pemuda dan anak-anak berlatih tari di halaman SDN Kaibon Petangkuran. Tim musik bekerja sama dengan kelompok musik lesung dari Desa Mirit, berusaha memadukan seni musik lesung tradisional dengan permainan Toki Gaba-Gaba dari Maluku. Tim seni rupa memberikan *workshop* menggambar pada para siswa SDN Wiromartan dan anak-anak di Desa Tlogo

Pragoto. Tim sablon bekerja di hampir semua desa.

Rangka Tulang menjadi tim yang mempersiapkan *ogoh-ogoh*, yang terdiri dari buah-buahan yang melambangkan hasil pertanian, *luku* dan *berujul* sebagai gambaran kondisi masyarakat desa yang aman dan tentram, kemudian gapura, kukusan, dan liong sebagai simbol rezim TNI AD di Urutsewu. Semua dikerjakan di empat desa yang berbeda dan tim Rangka Tulang cukup menjadi konseptor karena wargalah yang dominan mengerjakannya.

Kemudian ada Ethnohistori yang mengadakan *workshop* batik untuk ibu-ibu. Batik digunakan sebagai media bagi perempuan Urutsewu menyampaikan perspektifnya mengenai konflik. Mengapa media batik yang dipilih oleh Ethnohistori? Sebab batik di tahun 1912 adalah simbol perlawanan. Batik dahulu juga digunakan oleh perkumpulan sarakat dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi sebagai lawan dari monopoli Tionghoa, lawan bagi Kolonial Belanda, dan hegemoni Surakarta (Brenner, 1998).

GLI bersama Sanggar Nusantara dan komunitas teater 42 menjadi tim sastra yang melakukan *workshop* menulis diiringi dengan musik di dua sekolah. *Workshop* ditujukan sebagai pendidikan kritis melalui sastra; dalam konteks ini adalah menggali daya kritis anak-anak Urutsewu akan kondisi kampungnya yang disampaikan dalam bentuk cerita tertulis dan puisi. Dalam perjalanannya, penolakan terhadap tambang pasir besi dan TNI AD pun muncul. Anak-anak menjadi paham bahwa tambang pasir merusak alam, sedangkan TNI AD merusak mata pencaharian orangtua dan tempat bermain mereka.

Untuk mencapai tujuan dari *workshop*, tim sastra memilih menggunakan medium literasi. Literasi di sini berupa penggunaan praktik-praktik situasi sosial, historis, dan budaya dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya, serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu (Kern, 2000). Gerakan literasi semacam ini menurut Amanatia sesuai dengan konsep pendidikan *a la* Freire. Freire menawarkan pendidikan “hadap-masalah” yang menekankan

pada pentingnya kesadaran manusia terhadap realitas. Konsep ini merupakan kritik terhadap pendidikan gaya bank yang melihat anak didik sebagai objek untuk dilimpahi beragam rumusan dan dalil pengetahuan yang harus dihafal (Schipani dalam Manggeng, 2005).

Kemudian ada juga *workshop* melukis, yang diikuti oleh anak-anak yang telah *brainstorming* dalam *workshop* sastra. *Workshop* ini diawali dengan pertanyaan “Apa yang akan mereka lakukan untuk desanya saat mereka sudah besar nanti?” Anak-anak kemudian diajarkan untuk peka terhadap kondisi dan mencintai desanya dengan membayangkan harapan baik mereka untuk desa saat mereka dewasa. Salah satu gambar yang dibuat dalam *workshop* adalah sebuah *backhoe* (alat berat) penambang pasir yang membuat bolong wilayah pesisir dilengkapi dengan tulisan-tulisan “Tolak Tambang Pasir Besi-Petani Lara Ati-dan Disegel”. Amanat ini ditutup dengan refleksi “Kalau sejak kecil mereka telah kritis dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayahnya; kalau sejak awal mereka berani menyemai impian-impian positif tentang apa yang bisa mereka kerjakan di masa depan; kalau mereka kemudian tahu bagaimana cara mengorganisasikan sikap kritis dengan jalan masa depan mereka sendiri, maka kita bisa berharap masa depan Urutsewu lebih baik dari masa sekarang” (hlm 247).

PascaTurba. Capaian unik dari turba yang dilakukan ESBUSMUS antara lain tampak pada *workshop* sastra dan *workshop* batik. Kedua *workshop* ini menyasar golongan yang biasanya di dalam konflik tidak menjadi aktor utama. Tim sastra berhasil memutus kelas. Anak-anak, yang selama ini adalah kelas yang terpinggirkan di tengah perlawanan rakyat, diundang turut serta bersuara menentang kesewenang-wenangan militer dan korporasi di Urutsewu. Dengan ringan, ceria, dan menyenangkan anak-anak menyampaikan aspirasinya melalui karya sastra yang kritis, lugas, dan jujur.

Sementara itu, *workshop* batik oleh tim Etnohistori menyasar ibu-ibu. Sebab ibu-ibu menurut Tim Etnohistori sangat krusial dihadirkan dalam rangka memahami rasa dan pengalaman keseharian mereka dengan konflik. Para ibu di Urutsewu mungkin tidak berada di baris terdepan perlawanan. Namun, perjuangan mereka adalah menyiasati kondisi dan situasi suami, anak-anak, dan keluarga lainnya selama

konflik (hlm 169). Selain itu, mereka juga menunjukkan perlawanannya lewat medium batik. Batik menjadi media berestetika yang tepat bagi kaum perempuan dalam menyuarakan perlawanan dalam konflik. Melalui kegiatan membuat batik tersebut akhirnya melahirkan wacana perlawanan dengan menggali motif yang dekat dengan imajinasi, tentang konflik tanah, tragedi 16 April dengan TNI AD, potensi yang dimiliki, harapan akan masa depan, dan sebagainya.

Pergolakan Sekitar Peringatan 16 April

Warga lokal yang berperan penting dalam proses dan pelaksanaan AAB adalah Sunu dan Seniman. Sunu adalah kepala Desa Wiromartan sekaligus ketua Urutsewu Bersatu (USB). USB adalah sebuah organisasi rakyat yang dibentuk sebagai wadah perjuangan masyarakat di kawasan Urutsewu dalam menghadapi bahaya yang mengancam. Bahaya dalam konteks ini adalah klaim tanah sepihak oleh TNI AD dan penambangan pasir besi yang didukung Pemkab dengan dikeluarkannya Raperda RTRW yang menyebutkan bahwa wilayah Urutsewu adalah wilayah keamanan TNI AD dan wilayah penambangan pasir besi. Sementara itu, Seniman adalah tokoh masyarakat Urutsewu yang, menurut Dwicipta (Anggota ESBUSMUS), adalah seseorang yang mencurahkan hampir seluruh tenaga dan pikirannya untuk membela petani dan warga yang dirampas TNI. Selain itu, Seniman adalah koordinator dari Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Paguyuban ini menuntut pemerintah agar kawasan Urutsewu hanya diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.

ESBUSMUS hadir pertama kali ke Urutsewu pada tanggal 9 Maret 2014. Pada saat itu tidak ada intimidasi, selain ada Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang berseliweran di sekitar rumah Seniman yang saat itu digunakan sebagai tempat berkumpul. Menurut Dwicipta, hal itu disebabkan Babinsa mengira sedang ada konsolidasi politik massa terkait konflik tanah dengan TNI AD. Kunjungan kedua adalah pada 28-30 Maret 2014 dan basis pertemuan berpindah ke rumah Sunu. Pada kunjungan kedua ini ESBUSMUS menyebar ke masyarakat. Intimidasi muncul pada tanggal 30 Maret 2014, saat tiga anggota ESBUSMUS ingin mengambil gambar tembok pembatas lahan yang dibuat TNI. Mereka dilarang, meskipun pada akhirnya berhasil mengambil gambar diam-diam dari sisi yang lain.

Kunjungan ketiga adalah beberapa hari sebelum hari pelaksanaan AAB, yaitu sejak tanggal 11 - 16 April 2014. Intimidasi di lima hari sebelum tanggal 16 April 2014 adalah penyebaran kebohongan melalui media massa. Wartawan suara merdeka Arif Widodo menuliskan berita antara lain; 1) ESBUSMUS mendapatkan Rp 9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dari salah satu pejabat eselon II Pemkab Kebumen, 2) menyebut Kyai Imam Zuhdi sebagai ketua organisasi *Wong Parkiran*, yang anggotanya disebut melakukan pemerkosaan terhadap pengunjung Pantai Setrojenar, 3) Memberitakan kunjungan Pangdam Diponegoro ke Kebumen, yang menghimbau agar warga tak menghadiri acara pengajian serta pentas rakyat pada tanggal 16 April 2014, dan meminta LSM tidak memprovokasi warga. Namun, intimidasi ini gagal. Sebab pemberitaan tersebut muncul bersamaan dengan masa persiapan AAB ketika warga dan ESBUSMUS sedang sibuk. Intimidasi pun terus terjadi. Pada tanggal 15 April 2014 malam, di depan rumah Sunu, ada beberapa motor dan mobil patrol berseliweran hingga pukul dua dini hari

Hari H, 16 April 2016. Dwicipta di bagian ini menuturkan beberapa intimidasi yang dilakukan TNI pada rombongan arak-arakan. Angga Palsewa selaku koordinator arak-arakan dicegat oknum tentara dan diancam “Jangan macam-macam di sini, siap-siap saja menerima akibatnya. Kita akan bertemu di lapangan dan bertarung di sana. Kita lihat siapa yang mati di sana”, dan di lokasi lain, rombongan pembawa *ogoh-ogoh* yang sedang menuju ke Lapangan Setrojenar dihentikan oleh Dandim Kebumen. Penghentian ini berakhir setelah panitia pengajian meyakinkan tentara bahwa pihak panitia yang mengundang.

Pada akhirnya, memasuki siang di tanggal 16 April 2014 AAB dilaksanakan di Lapangan Setrojenar setelah pengajian berakhir. Konsep pertunjukan AAB adalah mampu memobilisasi massa, warga terlibat aktif dalam kegiatan ini, dan menjadikan hasil *workshop* sebagai isian dalam pertunjukan. Pada akhirnya AAB disambut meriah oleh masyarakat dan jamaah pengajian. Susunan acara AAB adalah sebagai berikut. (1) Jatilan; (2) Mantra; (3) Narasi; (4) Teater demit pengganggu petani—sambil semua hasil seni dalam *workshop* ditampilkan dan diakhiri dengan pertanyaan bernada sarkasme “tanah ini milik siapa?”, penonton bersorak dan bertepuk tangan, aktivis

serta tokoh Urutsewu berpelukan dalam suasana haru; (5) Pembacaan sikap oleh seniman merdeka dan Urutsewu bersatu; (6) menyanyikan lagu kebangsaan.

AAB dan proses panjangnya selama tiga bulan sampai pada puncaknya di tanggal 16 April 2014 bukanlah akhir. Namun, perjuangan warga Urutsewu masih panjang. Aktivis LSM mungkin hanya singgah sebentar meniupkan api semangat yang mulai padam. Masa depan Urutsewu nanti adalah tergantung warga Urutsewu sendiri. Apakah tanah yang menjadi objek konflik akan kembali dikuasai oleh warga Urutsewu sendiri.

Penutup

Buku ini sangat baik untuk dibaca oleh orang-orang yang tertarik dengan isu agraria. Bagi peminat agraria, untuk memahami lebih jauh mengenai tanah yang menjadi objek konflik di dalam buku ini, dapat membaca buku Maria Sumardjono yang berjudul *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* yang diterbitkan oleh Kompas.

Selain itu, buku ini juga sangat baik dibaca oleh pelaku kesenian. Sebab buku ini mengisahkan bagaimana ESBUSMUS bersama warga Urutsewu menggunakan kesenian sebagai cara untuk menyampaikan perlawanan mereka terhadap penguasaan tanah sepihak oleh TNI AD. Lebih lanjut, bagi pembaca umum yang tidak fokus pada isu agraria maupun kesenian, buku inipun dapat menjadi bacaan yang menarik untuk mengetahui bagaimana proses perjuangan warga di suatu wilayah tertentu dalam mempertahankan hak atas tanahnya melalui kesenian. Arak-Arakan Budaya kemudian menjadi cara yang menyenangkan dalam menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan.

Buku ini menambah wawasan bahwa fungsi seni tidak melulu untuk hiburan, tetapi dapat pula digunakan sebagai cara berjuang. Hal yang sangat menyenangkan untuk dibaca, terutama, adalah bagaimana kolaborasi antara sekumpulan aktivis dengan warga dalam waktu singkat—tiga bulan—bisa menghasilkan Arak-Arakan Budaya yang berkesan. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya tolong-menolong dan gotong-royong itu masih ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kern, Richard. (2000). *Literacy and Language Teaching*. New York: OUP Oxford.
- Kusni, Jean-Jacques. (2005). *di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten*. Yogyakarta: Ombak.
- Manggeng, Marthen. (2005). "Pendidikan yang membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia". *Jurnal Intim* Nomor 8.
- Sumardjono, Maria, (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sutisna, Ade. (2012). *Tinjauan Ringkas Etnografi Sebagai Penelitian Kualitatif*. Bandung: UPI.